BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pendidikan Agama Islam
2. Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Dalam perspektif teoritik, pendidikan seringkali di artikan dan dimaknai orang secara beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing dan teori yang di pegangnya. Terjadinya perbedaan penafsiran pendidikan dalam konteks akademik merupakan sesuatu yang lumrah, bahkan dapat di jadikan khazanah berfikir manusia dan bermanfaat bagi pengembangan teori itu sendiri.

Sebelum kita menguraikan secara detail tentang pendidikan agama Islam terlebih dahulu harus kita ketahui apa yang di maksud dengan pendidikan

Dalam SISDIKNAS Tahun 2003 di sebutkan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan definisi di atas, ada tiga hal yang menjadi pokok utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dari pengertian menurut SISDIKNAS Tahun 2003 tersebut dapat kita lihat bahwa, tujuan pendidikan secara umum adalah di arahkan untuk setiap peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Relevan dengan definisi pendidikan nasional, pendidikan agama Islam didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar terbentuknya kepribadian islam peserta didik sesuai dengan ajaran yang di bawa Rasulullah saw yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits.[[2]](#footnote-3)

Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan, hal ini bisa dilihat dari hasil proses maupun hasil pendidikannya. Supaya dapat memaksimalkan mutu pendidikan, maka di tuntut kepada pimpinan untuk senantiasa meningkatkan keprofesionalan dari segala unsur yang ada di lembaganya. Selanjutnya arah perkembangan yang menjadi tujuan pendidikan haruslah mencakup segala dimensi perkembangan. Dimensi perkembangan inilah yang nantinya sejalan dengan arah pendidikan nasional dan pendidikan agama Islam.

Berbicara masalah pendidikan maka, pembahasan itu haruslah terimplisit di dalamnya nilai-nilai Islam, sebab nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam pendidikan agama Islam sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi pendidikan agama Islam nantinya akan menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dengan pendidikan secara umum.

Pada dasarnya pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasadiah maupun rohaniyah dan menimbulkan hubungan harmonis setiap individu dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitar. Hal inilah sebenarnya yang menjadi tujuan pendidikan agama Islam yang di cita-citakan. Menurut H. Haidar Putra Daulay ia mengemukakan bahwa:

Pendidikan Islam berorientasi pada tiga hal, yaitu mencapai tujuan hablum minallah (hubungan dengan Allah SWT), hablum minannas (hubungan sesama manusia) dan hablum minal alamin (hubungan dengan alam)[[3]](#footnote-4)

Proses penyelenggaraan pendidikan agama Islam di setiap lembaga sekolah baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama diperlukan konsep pendidikan agama Islam yang komprehensif yang dapat mengantarkan pribadi muslim kearah tujuan akhir pendidikan agama Islam yang ingin dicapai. Hal ini dapat tercapai jika semua unsur-unsur pendidikan agama dapat dikembangkan, dipadukan sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan terlebih tuntunan globalisasi yang menuntut penyelenggaraan pendidikan agama Islam secara profesional dan terarah dalam menciptakan manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.

Sehubungan dengan realitas pendidikan agama Islam tersebut diatas, maka perlunya mengkaji beberapa problematika pendidikan agama Islam dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Putra Daulay, M. A yang memberikan uraian tentang hal-hal yang menjadi problematika pendidikan agama Islam dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Struktural lembaga- lembaga pendidikan agama Islam berada dibawah control dan kendali Departemen Agama, termasuk pembagian dan pendanaan pendidikan agama Islam sangat terbatas.
2. Kultural lembaga pendidikan agama Islam yang dianggap sebagai lembaga pendidikan”kelas dua” dari lembaga pendidikan umum. Hal ini dilihat dari outputnya, guru dan sarana serta fasilitas terbatas.
3. Sumber daya manusia sebagai pengelola dan pelaksanaan pendidikan agama Islam dari setiap jumlah dan professional masih kurang.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian di atas memberikan gambaran yang obyektif jika penyelenggaraan pendidikan agama Islam di setiap lembaga pendidikan sekolah perlu diprogramkan upaya pencapaian mutu pendidikan agama Islam secara komprehensif dengan merancang beberapa unsur pokok pendidikan agama Islam secara sistematik dan professional. Adapun hal-hal yang perlu diupayakan dan dirancang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Rancangan kurikulum yang meliputi:
	* + 1. Merancang keterkaitan ilmu-ilmu agama dan umum.
			2. Merancang nilai-nilai islami pada setiap mata pelajaran.
2. Pendidikan yang meliputi, orang tua murid, pemimpin dan masyarakatdi tuntut untuk dapat menyesuaokan diri dengan program kurikulum pendidikan agama Islam.
3. Merancang lembaga pendidikan agama islam yang ideal dengan persyaratan yang meliputi:
4. Memprogramkan seluruh aspek-aspek kurikulum pendidikan agama islam.
5. Direncanakan konsep peraturan antara ilmu-ilmu umum dan di programkan suasana islami baik dalam bentuk pergaulan sehari-hari, ibadah, pakaian dan sebagainya.
6. Dirancang materi bidang studi agama Islam yang memungkinkan peserta didik memiliki landasan umum agama untuk bisa di kembangkan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk tujuan kemasyarakatan.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan agama Islam harus di arahkan pada pencapaian tujuan pendidikan agama Islam, yaitu membentuk manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan bertakwa kepada Allah SWT, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, lembaga pendidikan agama Islam akan di jadikan sebagai pilihan utama dalam dalam mendidik anak didik di sebabkan mutu atau kualitas pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Agama Islam.

Lembaga pendidikan sekolah merupakan lembaga yang utama dalam proses pembinaan anak ke arah peningkatan ilmu pengetahuan, moral dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian lembaga pendidikan sekolah harus dikelola secara professional dan terarah oleh berbagai unsur penggerak pendidikan di sekolah. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam yang dikemukakan oleh Armai Arief M. A yang mengatakan bahwa:

Tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan pada tujuan yaitu membentuk insan paripurna yang akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membentuk insan purna untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat.[[6]](#footnote-7)

Hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah SWTdalam Q.S. Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut:

 

Artinya.”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.[[7]](#footnote-8)

Secara umum faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan agama Islam terbagi dua yaitu factor internal dan faktor eksternal

1. Faktor internal

Faktor internal ini adalah factor yang berasal dari dalam diri siswa yang meliputi:

1. Sikap belajar

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu, yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu, mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaiakan.

1. Motivasi belajar

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi atau tiadanya motifasi belajar akan melemahkan kegiatan belajar. Selanjutnya, mutu hasil belajar akan menjadi rendah.

1. Konsentrasi belajar

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya

1. Faktor eksternal
2. Guru

Guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Sebagi pendidik, ia memusatkan perhatian pada kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar. Kebangkitan belajar tersebut merupakan wujud emansipasi diri siswa. Sebagai guru yang pengajar, ia bertugas mengelola kegiatan belajar siswa di sekolah.

1. Sarana dan prasarana

Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olah raga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olah raga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pembelajaran yang lain. Lengkapnya prasarana dan sarana pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang baik.

1. Lingkungan sosial sekolah

Siswa-siswa disekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan, yang disebut lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial siswa tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Sebagai lustrasi, seorang siswa dapat menjabat sebagai pengurus kelas, sebagai ketua kelas, dan sebagainya

Usaha peningkatan mutu pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan sekolah kearah pencapaian tujuan pendidikan yang optimal terus ditingkatkan, untuk memenuhi itu maka semua unsur penggerak pendidikan di sekolah di selenggarakan secara bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hal ini di sebabkan karena pendidikan diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh dan terus-menerus. Hal ini sejalan dengan pendapat H. Abdurrahman yang memberikan uraian tentang faktor-faktor yang terpenting dengan pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut:

1. dana dalam mencapai tujuan pendidikan
2. sarana dan peraturan pendidikan
3. metode sebagai alat pendidikan
4. peserta didik.[[8]](#footnote-9)

Secara singkat penulis akan memberikan uraian dari faktor-faktor yang terpenting dalam pendidikan di sekolah tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Dana dalam mencapai tujuan pendidikan

Dana merupakan unsur yang terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ketersediaan dana aatau keuangan sekolah yang di atur secara profesional dalam administrasi keuangan sekolah akan mempengaruhi seluruh proses penyelenggaraan pendidikan secara baik kearah pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

* 1. Sarana dan peraturan pendidikan

Proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sesuai tujuan yang di harapkan jika sarana dan prasarana sekolah tidak cukup tersedia begitupun dengan peraturan yang mengingat seorang pendidik atau guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam membimbing dan mengarahkan anak didik yang diatur dalam kode etik guru. Hal ini juga sejalan dengan penfapat Ahmad Daeng Marimba yang merumuskan tugas pendidik adalah sebagai berikut:

Tugas pendidik (guru) adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atas kesanggupan peserta didik, menetapkan situasi yang kondusif bagi pengetahuan yang di miliki guna di transformasikan pada peserta didik dan membuka diri terhadap seluruh kelemahan atau kekurangannya.[[9]](#footnote-10)

1. Metode sebagai alat pendidikan

Metode dalam pembelajaran adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi seorang pendidik atau guru. Metode pembelajaran seorang guru merupakan pendekatan pengajaran yang mutlak dipahami dan diaplikasikan oleh pendidik dalam setiap interaksi pembelajaran di sekolah. Dengan demikian penggunaan metode secara tepat dan efektif bagi kebutuhan dan perkembangan anak didik akan mempengaruhi sikap, perilaku dan prestasi anak didik kearah pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini juga relevan dengan pendapat Abu Ahmadi yang memberikan definisi tentang metode mengajar adalah sebagai berikut:

Metode mengajar adalah tekhnik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pengajaran kepada siswa di dalam kelas, baik individual atau secara kelompok agar pelajaran itu dapat di serap, di fahami dan di manfaatkan oleh siswa dengan baik. Makin baik metode mengajar, maka efektif pula pencapaian tujuan pendidikan.[[10]](#footnote-11)

1. Kurikulum

Pada prinsipnya kurikulum sekolah disusun berdasarkan tujuan pendidikan yang ingin di capai dan di orientasikan kepada kepentingan masa sekarang atau masa yang akan datang dan kepentingan anak didik, baik secara psikologis (kejiwaan) maupun secara fisiologis (jasmani). Hal ini sesuai dengan rumusan kurikulum oleh Abdurrahman yang mengatakan bahwa:

Kurikulum merupakan wahana atau perangkat untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mengarahkan setiap mutu pelajaran bidang studi melalui tujuan tiap mata pelajaran yang ddisesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak didik.[[11]](#footnote-12)

1. Peserta didik

Peserta didik merupakan komponen terpenting dalam proses pendidikan yang berfungsi sebagai subyek dan obyek pendidikan, sehingga dengan demikian aktivitas kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik dalam proses pendidikan. Peserta didik merupakan orang yang belum dewsa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang memerlukan bimbingan dan arahan orang lain menuju kedewasaan. Hal ini sejalan dengan defenisi peserta didik yang dikemukakan oleh Samsul Nizar yang mengatakan bahwa:

Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani, maupun rohani yang harus dipenuhi. Di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan biologis, kasih saying, rasa aman, harga diri, realisasi diri dan sebagainya. Kesemuanya itu penting dipahami oleh pendidik agar tugas-tugas kependidikannya dapat berjalan secara baik dan lancar. [[12]](#footnote-13)

Berdasarkan beberapa uraian di atas, memberikan gambaran yang obyektif, bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus dikelola secara teratur, terencana, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dari berbagai komponen penggerak pendidikan kearah pencapaian mutu pendidikan agama islam sebagai bagian dari tujuan pendidikan yang akan di capai. Itulah sebabnya perlunya berbagai unsur pendidikan untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan secara professional dan sistematik.

1. Manajemen Berbasis Sekolah
2. Definisi Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang berarti pengelolaan, pengaturan, atau pengurusan. Dalam pengertian umum manajemen adalah serangkaian kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh suatu kelompok, kumpulan atau organisasi tertentu demi pencapaian tujuan.

Manajemen menurut GR, Terry (dalam Nanang Fatah) adalah:

Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dengan menggunakan manusia atau orang dan sumber daya lainnya.[[13]](#footnote-14)

Relevan dengan yang di atas Zumrah menyebutkan MBS adalah suatu usaha dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan.[[14]](#footnote-15)MBS memberi wewenang kepada sekolah untuk mengatur dan mengelola semua unsur yang terkait dengan sekolah itu sendiri.

Hal ini juga sesuai dengan yang di kemukakan Hendrawi bahwa, MBS adalah manajemen yang menekankan pada asas keterbukaan untuk turut bertanggung jawab terhadap sekolah.[[15]](#footnote-16)

Selain pendapat di atas manajemen berbasis sekolah juga sering di artikan sebagai metode pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambil keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.

Menurut Levacic proses manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah adalah:

1. Penetapan atau telaah tujuan sekolah
2. Review keberhasilan pelaksanaan rencana tahunan sekolah sebelumnya
3. Pengembangan prioritas kerja dan jadwal waktu pelaksanaan
4. Justifikasi program prioritas dalam kesesuaiannya dengan konteks sekolah
5. Perbaikan rencana dengan melengkapi berbagai aspek perencanaan
6. Implikasi sumber daya dalam pelaksanaan program prioritas
7. Pelaporan hasil.[[16]](#footnote-17)
8. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

MBS merupakan pengalihan pengambilan keputusan dari tingkat pusat ke tingkat sekolah. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan di pandang sebagai otonomi di tingkat sekolah dalam pemberdayaan sumber-sumber sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan, dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatannya kepada setiap pihak yang berkepentingan.

Konsekuensi logis dari adanya limpahan kewenangan tersebut adalah Pemda juga harus di beri kewenangan dalam mencari, mempergunakan dan menyediakan fasilitas yang di perlukan. Di samping itu Pemda berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.kepala sekolah yang di beri kewenangan untuk mengatur penempatan guru di kelas, jadwal pelajaran, sistem evaluasi apa yang akan di gunakan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan sebagainya.

Asumsi dasar pertama yang mendasari implementasi MBS adalah bahwa sekolah di pandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan di mana kepala sekolah adalah manager pendidikan. Konsekuensinya kepala sekolah di tuntut untuk bertanggung jawab atas seluruh komponen sekolah dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik internal (siswa) maupun eksternal (masyarakat), pemerintah, maupun lembaga industri dan dunia kerja (stakeholders).[[17]](#footnote-18)

Berdasarkan asumsi dasar di atas dapat kita ketahui bahwa yang menandai atau yang menjadi karakteristik dari MBS adalah di antaranya adalah:

1. Adanya pemberian otonom yang luas kepada sekolah
2. Adanya profesionalisme kepala sekolah yang tinggi
3. Adanya keterlibatan orang tua siswa, masyarakat serta yang berkepentingan dengan sekolah
4. Adanya tim kerja (team work)[[18]](#footnote-19)

Sejalan dengan karakteristik di atas Sudarmawan Damin juga mengemukakan bahwa, karakteristik ideal dari manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu:

1. Adanya keragaman dalam pola penyajian guru
2. Manajemen situs sekolah atau manajemen otonomi sekolah
3. Pemberdayaan guru secara optimal
4. Pengelolaan sekolah secara partisipatif
5. Sistem yang disentralisasikan
6. Sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam menentukan aneka pilihan
7. Hubungan partnership antara dunia bisnis dan dunia pendidikan
8. Akses terbuka bagi sekolah
9. Pemasaran sekolah secara kompetitif.[[19]](#footnote-20)

Manajemen berbasis sekolah memberi kebebasan dan keleluasan yang besar pada sekolah di sertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawabpengelolaan sumber daya dan pengembangan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga lebih terkonsentrasi pada tugas, mendorong profesionalisme kepala sekolah.

Diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi melakukan eksperimentasi-eksperimentasi. Sehingga dengan demikian, MBS mendorong profesionalisme kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, melalui penyusunan kurikulum yang efektif, rasa tanggung jawab sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkatkan dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengantuntunan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat di maksimalkan malalui peningkatan partisipasi orang tua, misalnya orang tua dapat mengamati secara langsung proses belajar anaknya. Manajemen berbasis sekolah sebagai paradigma baru manajemen pendidikan memberikan otonomi kepada sekolah serta melibatkan peran masyarakat sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

1. Pihak-Pihak yang Berperan Dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, masing-masing pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan disekolah harus memiliki peran yang sama penting.masing-masing pihak yang dimaksud adalah kantor pendidikan pusat, Kantor pendidikan daerah kabupaten/kota, dewan sekolah, kepala sekolah, para guru, orang tua siswa dan masyarakat.

1. Peran kantor pendidikan pusat dan daerah.

 Peran dan fungsi departemen pendidikan di Indonesia pada era otonomi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat antara lain menatapkan standar kopetensi siswa dan warga, pengaturan kurikulum nasional dan sistem penilaan hasil belajar, penetapan pelaksanaan pendidikan, penetapan persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa, menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu, menjaga kesetaraan mutu antara daerah/kota agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok, menjaga kelansungan pembentukan budi pekerti, semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme melalui program pendidikan.

 Nurkholis menyebutkan bahwa:

Peran pemerintah pusat dalam pengaturan pendidikan akan lebih bersifat stategis dan menghindari wilayah operasional. Hal-hal yang bersifat operasional akan ditentukan sendiri oleh sekolah besrta orang tua siswa dan masyrakat sekitarnya. Yang perlu diperhatiakan adalah kebijakan strategis yang ditetapakan pemerintah harus memberikan ruang gerak kepada sekolah yang lebih besar lagi sehingga kreativitas sekolah untuk mengembangkan sekolahnya dapat berkembang dengan maksimal.[[20]](#footnote-21)

1. Peran pemerintah daerah kabupaten/kota

Peran pemerintah daerah kabupaten/kota adalah menfasilisasi dan membantu staf sekolah atas tindakanya yang akan dilakukan sekolah. pemerintah daerah bertugas untuk mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja siswa. Oleh karena itu, kantor pemerintah daerah memerlukan karyawan yang potensial, mampu menyeleksi dan menyaring para pelamar, menjalin komunikasi dengan para pelamar yang berkualitas dalam mengisi lowongan pekerjaan.

 Dalam kaitanya dengan kurikulum, kantor pemerintah daerah menspesifikasi tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan dan kemudian memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menentukan metode untuk menghasilkan mutu pembelajaran. Bahkan beberapa daerah menyerahkan pemilihan buku pelajaran kepada sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, nurkolis menyebutkan bahwa secara lebih spesifik dinas pendidikan kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta di Kabupaten/ Kota.
2. Memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh asset atau sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga guru, prasarana, dan sarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan dan sebagainya.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidikan di Kabupaten/ Kota.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tugas dan fungsi pokoknya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapakan oleh pemerintah pusat dalam menerapakan MBS.[[21]](#footnote-22)

Selanjutnya Nurkholis ia juga mengemukakan selain tugas di atas, dinas kabupaten/kota juga mempunyai peranan sebagai:

1. Evaluator dan inovator, yaitu mengevaluasi potensi daerah Kabupaten/ Kota.
2. Motivator, yaitu memberikan motivasi kepada para kepala sekolah berupa penghargaan atas keberhasilan dan memberikan hukuman atas kekeliruan dalam menjalankan tugas.
3. Standardisator, yaitu bersama-sama dengan para kepala sekolah membuat standar mutu berdasarkan kebutuhan daerah tersebut, kebutuhan nasional, dan kebutuhan global.
4. Informan, yaitu menyampaikan informasi kepada para kepala sekolah akan segala kebijakan pendidikan dikabupaten/kota.
5. Delegator yang mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kesekolah masing-masing dalam hal pengambilan keputusan, pembinaan sumberdaya manusia, pemberian penghargaan dan hukuman serta berbagai informasi.
6. Koordinator, yaitu mengoordinasikan program-program pendidikan didaerah Kabupaten/ Kota tersebut dengan kabupaten/kota lain sehingga tidak terjadi kesenjangan mutu antara kabupaten/kota.[[22]](#footnote-23)
7. Peran dewan sekolah dan pengawasan sekolah

Dewan sekolah akan memiliki peran untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang luas, menyatukan visi, memperjelas visi baik untuk pemerintah daerah maupun untuk sekolah itu sendiri. Dewan sekolah menentukan kebijakan sekolah ,visi, dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah. Oleh karena itu dewan sekolah sebaiknya diisi oleh mereka yang mampu menganalisis kebijakan pendidikan , mampu melaksanakan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah , serta memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan daerahnya

Dewan sekolah sebagai wadah yang diharapkan bisa menyatukan komponen sekolah. oleh karena itu pimpinan dewan sekolah dipilih dari mereka yang benar – benar memiliki kemampuan kepemimpinan dan bukan mampu manajerial. Pimpinan dewan sekolah sebaiknya bukan pejabat pemerintah. melainkan tokoh masyarakat yang telah diakui kapasitas kepemimpinanya. karena fungsi dewan sekolah bukan fungsi structural dimana tugas – tugas yang diberikan kepada anggota dewan sekolah didasari oleh adanya kepentingan bersama .rasa kepentingan bersama itu taklain adalah kepentingan untuk meningkatkan kualitas seluruh siswa di sekolah itu yang akan berpengaruh terhadap masyarakat disekitarnya.

Para pengawas juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, bertindak sebagai model dalam melaksanakan MBS dengan cara melakukan sendiri dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dengan staf pemerintah daerah.

Peran pengawas sekolah harus diarahkan pada supervisi dalam makna yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan bantuan dan pengarahan kepada guru dan staf sekolah bila menemui kesulitan, peran pengawas sekolah sebagai supervisor yang selama ini mencari kesalahan para guru dan staf sekolah harus dihentikan karena tindakan yang demikian tidak akan mampu menciptakan budaya sekolah yang baik dan kuat.

1. Orang Tua Dan Masyarakat

Tata hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat dimaksud untuk mendukung penciptaan suasana yang kondusif bagi proses pembelajaran siswa yang efekti dan pengembangan kepribadian serta budi pekerti siswa baik disekolah maupun di rumah. Tata hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat paling tidak memuat:

1. Upaya dan bantuan orang tua untuk ikut serta mendidik anak–anaknya dalam bersikap, berprilaku dan belajar di rumah dalam upaya mendukung pendidikan budi pekerti in- action disekolah
2. Saling tukar informasi antara sekolah dan orang tua tentang perkembangan kepribadian dan belajar anak masing-masing serta upaya mencari Alternatif pemecahan bila mana anak mereka mengalami hambatan balajar atau masalah etika dan moral.
3. Pemecahan masalah apabila terdapat kesalah phaman antara sekolah dengan orang tua dalam pendidikan anak- anaknya.
4. Peran guru dan Administrasi

 Sehubungan dengan guru sebagai salah satu komponen sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan MBS, maka guru dituntut untuk dapat meningkatkan profesionalismenya sebagai pengajar dan pendidik. peran guru dalam MBS, adalah sebagai rekan kerja, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pengajaran.

Agar para guru memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan sekolah, maka perlu dilakukan desentralisasi pengetahuan. Dan ini merupakan tanggung jawab kepada sekolah dalam mensosialisasi MBS terhadap guru dan personil sekolah.

1. Kepala sekolah

Kepala sekolah adalah sebagai pelaksana MBS di sekolah yang bertindak sebagai motivator dan koordinator dalam keefektivitas MBS, di sekolah. Dalam kerangka MBS, menurut Mulyasa Kepala Sekolah harus:

1. Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar.
2. Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan belajar.
3. Memiliki kemampuan dan ketermpilan mengatasi situasi sekitar berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan kejadian dimasa depan berdasarkan situasi sekarang.
4. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pendidikan disekolah, dan
5. Mampu memamfaatkan peluang, menjadi tantangan sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan.[[23]](#footnote-24)

Sehubungan dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan MBS, penulis berkesimpulan keberhasilan pelaksanaan MBS sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah, guru dan partisipasi masyarakat sebagai pelaksanaan MBS dan merupakan faktor yang paling dominan terhadap penerapan MBS dan juga tergantung pada kesiapan SDM serta kerjasama yang harmonis antara pihak terkait diatas akan menentukan keberhasilan penerapan MBS.

Dalam melaksanakan MBS diperlukan keterlibatan semua personil sekolah baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah para guru, pegawai orang tua siswa dan komite atau dewan sekolah. Dalam Depdiknas ( 2001:3) dikemukakan bahwa:

Manajemen Berbasis Sekolah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/ keluesan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional serta peraturan perundang- undangan yang berlaku”.[[24]](#footnote-25)

4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Paradigma manajemen berbasis sekolah beranggapan bahwa satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkat mikro harus di hasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut. Dengan adanya program yang relevan, di harapkan sekolah akan mampu menggali partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan sekolah, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah.

Sementara itu menurut Direktorat SLTP Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan secara khusus tujuan implementasi MBS adalah:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah.
4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.[[25]](#footnote-26)

Selain hal yang disebutkan di atas kepemimpinan sekolah yang kuat juga akan mendorong keefektifan manajemen sekolah dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini seorang lepala sekolah yang efektif dalam menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah haruslah memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki kepala sekolah antara lain:

* 1. Memiliki kemampuan untuk mengarahkan personil sekolah, terutama guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan materi pembelajaran
	2. Memiliki kesadaran tentang efisiensi waktu, sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
	3. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan stakeholders berprtisipasi aktif dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah.
	4. Memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan siapapun, terutama personil sekolah yang harmonis dan dinamis dalam mencapai tujuan sekolah.
	5. Mampu menciptakan kerja sama, baik internal maupun pihak eksternal sekolah.[[26]](#footnote-27)

Oteng Sutisna menegaskan bahwa faktor keberhasilan seorang pemimpin adalah tipe karakteristik (bawaan) yang dimilikinya. Tipe-tipe kepemimpinan tersebut dapat di kategorikan dalam lima tipe, yaitu:

1. Tipe otokratik, gaya dimana pemimpin sangat otoriter dalam pengambilan keputusan. Bawahan tidak diberikan kesempatan untuk terlibat.
2. Tipe patermalistik, meskipun bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, namun dalam operasionalnya pemimpin mengambil alih semua peran itu.
3. Tipe kharismatik, tipe ini sangat di hormati dan disegani karena memiliki daya pikat dan kewibawaan di mata bawahannya.
4. Tipe Laissez Faire, yaitu gaya santai dimana pimpinan tidak mengambil peduli dan sangat jarang berinteraksi dengan bawahannya.
5. Tipe demokratik, yaitu tipe yang merupakan tipe ideal yakni menempatkan bawahan sesuai dengan perannya masing-masing.[[27]](#footnote-28)

Selain itu yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah adalah guru, peserta didik, sarana dan prasarana, serta lingkungan. [[28]](#footnote-29)

1. Faktor Guru

Guru merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagai guru, guru memiliki banyak peran di antaranya sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih. Biasanya dalam pembelajaran guru dituntut memahami kurikulum yang berlaku, karakteristik siswa, fasilitas dan segala sumber daya yang ada, sehingga semuanya dijadikan komponen-komponen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang efektif, efisien dan kondusif membutuhkan kerja semua elemen yang saling bahu membahu untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan harapan serta tujuan pendidikan.

Guru adalah salah satu komponen, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Selama guru hanya dianggap pengajar, yang menyampaikan materi pembelajaran setelah itu selesai. Tugas guru sebenarnya sangat berat karena bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik dan melatih. Tugas mendidik inilah yang sangat berat bagi seorang guruh, karena membutuhkan waktu, kesabaran, bahkan pengorbanan.

Yang dimaksud dengan mendidik adalah memberikan latihan, (ajaran, bimbingan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, sehingga pendidikan dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.[[29]](#footnote-30)

Dari pengertian ini kita mendapat gambaran bahwa, guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi lebih jauh dari itu tugas seorang guru yang paling berat adalah mendidik. Tugas mendidik inilah yang tidak mudah dan tidak gampang dilakukan oleh semua orang, karena membutuhkan kesabaran dan pengorbanan waktu yang lama untuk menjadikan orang menjadi cerdas dan berakhlak yang baik.

1. Faktor Siswa

Siswa adalah organisme yang unik berkembang sesuai terhadap tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anakpada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama itu, di samping karakteristik yang melekat pada diri anak.

Sikap dan penampilan siswa dalam proses pembelajaran, juga merupakan aspek lain yang dapat mempengaruhi sistem pembelajaran. Dalam pembelajaran kadang ditemukan siswa yang aktif dan adapula yang tidak aktif , pendiam dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi pembelajaran didalam kelas karena interaksi siswa dan guru merupakan faktor yang menentukan dalam pembelajaran.

1. Faktor sarana dan prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran serta perlengkapan sekolah lainnya. Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran misalnya, jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil dan lain sebagainya.

Berikut ini beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana:

1. Dapat menumbuhkan gairah dan motivasi guru dan siswa dalam pembelajaran
2. Memberikan pilihan pada siswa untuk belajar.
3. Faktor Lingkungan

Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran yaitu, faktor organisasi kelas dan iklim sosial.Faktor organisasi di dalamnya meliputi, jumlah siswa dalam kelas yang merupakan aspek penting dalam mempengaruhi proses pembelajaran.

Faktor lain dari dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran adalah faktor iklim social-psikologis. Yang dimaksud dengan iklim ini adalah keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial ini dapat terjadi secara internal dan eksternal.

Iklim sosial-psikologis secara internal adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya iklim sosial antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, bahkan antara guru dengan pimpinan sekolah. Iklim sosial-psikologis eksternal adalah keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan dunia luar misalnya, hubungan sekolah denagan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga masyarakat, dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional maka yang diperlukan bukan hanya keterlibatan guru sebagai orang yang melakukan interaksi dengan peserta didik, tetapi juga melibatkan semaua komponen yang telah di sebutkan di atas, serta tenaga kependidikan seperti pengawas yang merupakan mitra guru untuk mencapai proses pembelajaran, pengawas ini juga mampu memberikan bantuan kepada guru sehingga proses pembelajaran dan hasil pendidikan menjadi bermutu.[[30]](#footnote-31)

1. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat sekali. Bahkan asal mula masyarakat berbudaya ditentukan oleh fungsi sekolah. Terkait hal ini dijelaskan oleh Scotter:

Education as an embryonic community. In practice the school would offer many new learning environments for the student, including libraries, gymnasiums, working areas, art and music rooms, science laboratories, garden and playgrounds. Beyond the classroom walls, he envisioned the school as adynamic center of the community”.[[31]](#footnote-32)

Dengan adanya proses dalam lingkungan pembelajaran baik di kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, seni musik, taman, laboratorium, maka secara psikologis dan didaktis dapat membentuk pengalaman anak menuju pengembangan pribadi. Sekolah bekerja sama dengan berbagai lembaga kemasyrakatan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

MBS yang merupakan paradigma baru dalam pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (perlibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari

MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan kewenangan sekolah memberikan pengaruh langsung kepada peserta didik orang tua dan guru.
2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal.
3. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.
4. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah dan perubahan perencanaan.

Adapun tujuan manajemen berbasis sekolah adalah:

1. Memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif
2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama
4. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada masyarakat
5. Meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang ingin di capai.[[32]](#footnote-33)
6. Penelitian Yang Relevan

Lahirnya manajemen berbasis sekolah merupakan buah dari diberlakukannya otonomisasi pendidikan. Berbicara tentang manajemen berbasis sekolah sudah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat tentang topik ini. berikut ini adalah Salah satu judul penelitian yang relevan dengan judul ini adalah “ Imlementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di SLTP Negeri 4 Kendari” oleh Mutmainna Sudiamin. Dalam skripsinya ia berkesimpulan bahwa, implementasi manajemen berbasis sekolah dapat meningkat mutu pendidikan lebih khususnya lagi pendidikan agama Islam.

Relevan dengan penelitian di atas dalam skripsinya Aris Try Andreas dengan judul “ Manajemen Berbasis Sekolah ( tela’ah implementasi dan implikasi pada proses pembelajaran di M.Ts Negeri 1 Kendari) juga mengemukakan dengan adanya MBS sekolah dilatih untuk mandiri dengan melibatkan segala sumber dan potensi yang dimilikinya.

Penelitian lain yang relevan dengan ini adalah “ pelaksanaan MBS ( survei di M.Ts Landeo), oleh Zumrah berkesimpulan, MBS dengan prinsip yang bertumpuh pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik berpotensi untuk meningkatkan pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpuh pada tingkat sekolah mampu menggerakan seluruh potensi dan sumber daya di sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas dalam penulisan skripsi ini penulis memotret dan mengungkapkan secara alamiah, pelaksanaan atau implementasi manajemen berbasis sekolah dalam pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Mawasangka Tengah.

1. Kerangka Pikir.
2. Skema kerangka pikir

Manajemen berbasis sekolah (MBS)

Team work

Partisipasi masyarakat

Otonomi

Profesionalisme kepala sekolah

PAI

Hasil

Skema di atas memberikan gambaran bahwa, yang menjadi titik sentral penulis dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Mawasangka Tengah” adalah bagaimana penerapan MBS dalam pendidikan agama Islam (PAI) ditinjau dari empat karakteristik MBS yaitu, kepemimpinan kepala sekolah yang professional, otonomi sekolah, partisipasi dari masyarakat serta dengan adanya team work. Selanjutnya inilah yang akan diulas penulis dalam penelitian ini.

1. Wina Sanjaya., Kurikulum dan Pembelajaran., (Jakarta, Kencana, 2009), h. 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Pemerintah RI., Undang- Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, (Jakarta, DEPDIKNAS, 2003), h.103 [↑](#footnote-ref-3)
3. H. Haedar Putra Daulay, Pendidikan Islam, (Jakarta, Pranata Media, 2004), h. 155 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid.,h.155-158 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid., h. 155-160 [↑](#footnote-ref-6)
6. Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta, Ciputat Press, 2002), h. 22 [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta, Yayasan Penerjemah Al-Qur’an, 2004), h. 858 [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdurrahman, Pengelolaan Pengajaran, (Ujung Pandang, Bintang Selatan, 1990), h. 19 [↑](#footnote-ref-9)
9. H. Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta, Ciputat Pers, 2002), h. 44 [↑](#footnote-ref-10)
10. H. Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung Pustaka Setia, 1997), h. 52 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid, h. 35 [↑](#footnote-ref-12)
12. Samsul Nizar, Op. Cit, h.48 [↑](#footnote-ref-13)
13. Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung, Remaja Rosda Karya), 2003, h. 13 [↑](#footnote-ref-14)
14. Zumrah., Implementasi MBS di M.Ts Lendeo, (Perpustakaan STAIN. 2008) h.8 [↑](#footnote-ref-15)
15. Hendrawi, Implementasi MBS di SDN 1 Kosali, (Perpustakaan STAIN. 2008)h.11 [↑](#footnote-ref-16)
16. Amirudin Siahan dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta, Ciputat Press), 2006, h. 6 [↑](#footnote-ref-17)
17. Abdul Kadir, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep dan Strategi Memenangkan Persaingan Mutu, (Kendari,Membumi Publishing, 2009), h. 36 [↑](#footnote-ref-18)
18. Amiruddin Siahan, Khairuddin, Irwan Nasution., Manajemen Pendidikan Berbasisi Sekolah (Bandung, Quantum Teaching. 2006 ) h. 59 [↑](#footnote-ref-19)
19. Sudarmawan Danim, Inovasi Pendidikan, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002), h. 176 [↑](#footnote-ref-20)
20. Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan aplikasi, (Jakarta, PT. Gramedia, 2003),h 76

 [↑](#footnote-ref-21)
21. Nurkholis, Ibid, 76 [↑](#footnote-ref-22)
22. Nurkholis, ibid, h. 96 [↑](#footnote-ref-23)
23. Mulyasa. E, Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional. (Bandung.PT Remaja Rosda Karya, 2004),h. 78 [↑](#footnote-ref-24)
24. Depertemen Pendidikan Nasional, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 1 (Jakarta Depdikas,2001), h.56 [↑](#footnote-ref-25)
25. Hasbullah., Otonomi Pendidikan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 2006, h. 72. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid, h. 134 [↑](#footnote-ref-27)
27. Oteng Sutisna., Administrasi Pendidikan Dasar, Teoritis dan Praktek Professional, (Bandung, Angkasa, 1993), h. 79-80. [↑](#footnote-ref-28)
28. Wina Sanjaya,Perencanaan dan Desain Pembelajaran, (Jakarta, Kencana, 2009), h. 15 [↑](#footnote-ref-29)
29. Wahjosumidjo., Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grafindo. 2003) h. 122 [↑](#footnote-ref-30)
30. Amiruddin Siahan dkk, Manajemen pengawas pendidikan, (Jakarta, Ciputat Press, 2006), h.102 [↑](#footnote-ref-31)
31. Syafaruddin dan Irwan Nasution., Manajemen Pembelajaran, (Medan, Ciputat Press, 2005), h.4 [↑](#footnote-ref-32)
32. Amiruddin Siahan dkk, Op. Cit., h. 53 [↑](#footnote-ref-33)